

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: a) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c) Penyelenggaraan urusan desentralisasi; d) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e) Penyelenggaraan tugas umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2016. Selain itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan turunannya yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah

melalui Sekretaris Daerah dalam bidang Telekomunikasi, Informatika dan Persandian.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai media fasilitator atau media penghubung antara, masyarakat pengguna informasi dan pemerintah, terutama dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Lombok Tengah menuju “**Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman sejahtera dan Bermutu**”.

1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Tabel 1

Kelompok Sasaran, Indikator kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kelompok Sasaran	Lokasi Kegiatan
1	Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan	1. Jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana IT 3. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. 4. Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo.	SKPD	Kabupaten
2	Meningkatnya	Jumlah data dan dokumen	SKPD	Kabupaten

	pengembangan dan pemeliharaan data base	yang dikelola dan di publish melalui website		
3	Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah	Jumlah pengunjung website	SKPD, Masyarakat	Kabupaten
4	Tersedianya Buku Lombok Tengah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Data Sektoral	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah	SKPD, Kecamatan, Masyarakat	Kabupaten
5	Terlaksananya sosialisasi pengamanan informasi daerah	Meningkatnya efektifitas pengamanan informasi dan komunikasi daerah	SKPD, Kecamatan	Kabupaten

1.2. STRUKTUR ORGANISASI SKPD DAN DUK SKPD

1.2.1 Struktur Organisasi

Untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah diturunkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik. Adapun unsur-unsur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris
 - Kepala Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Kasi Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi
 - Kasi Informasi Publik dan Layanan e-Gov
 - Kasi Telematika dan Pengembangan SIM
4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
 - Kasi Pengolahan dan Pengamanan Persandian

- Kasi Statistik
 - Kasi Perekaman dan Verifikasi Data
5. Jabatan Fungsional.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perbub Nomor 81 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Lombok Tengah

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah

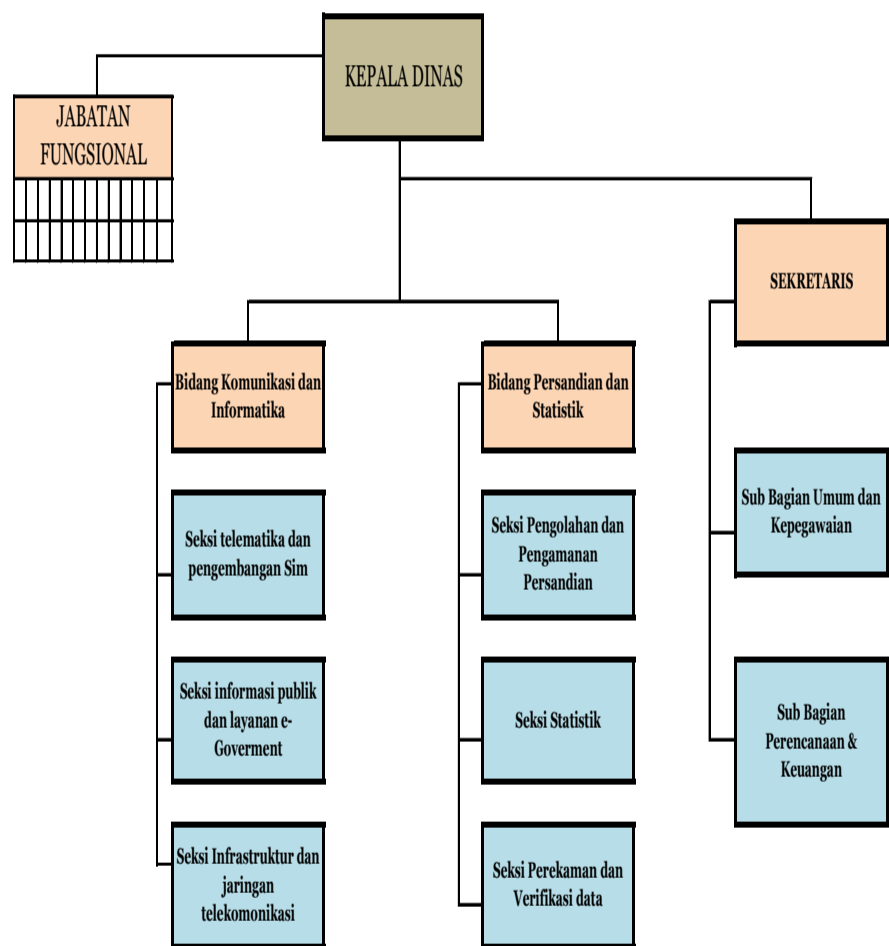
Nomor : Tahun 2016

Tanggal :

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Gambar 1

1.2.2 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SKPD

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Komunikasi dan Onformatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 31 Orang PNS dengan Tingkat Pendidikan S2 = 4 Orang, S1 = 17 Orang, D-III = 1, D-II = 1 orang SMA = 7 Orang dan SD = 1 orang. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu oleh 5 orang staf Non PNS termasuk didalamnya tenaga jasa tukang. Berikut daftar SDM

yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
Per 31 Desember 2018:

Tabel 2
Tabel Register Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah Keadaan 31 Desember 2018

No.	NAMA	L/P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang telah diikuti	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Drs. H. Muhamad Zarkasi	L	IV/b	IIb	Kepala Dinas	S1	III	
2.	Drs. H.L. Suardana, MH	L	IV/b	IIIa	Sekretaris	S2	III	
3.	H. L. Syaharuddin, SH., MH	L	IV/a	IIIb	Kabid Lominfo	S2	III	
4.	Lalu Haerul Anwar, S.Sos	L	IV/a	IIIb	Kabid Sandi dan Statistik	S1	-	
5	Ir. Anas Puji Antadi	L		IVa	Kasi Infrastruktur dan Jaringan Telekom	S1	IV	
6	Ir. M. Agus Hirjan	L		IVa	Kasi Informasi Publik dan Layanan e-Gov	S1	IV	
7	L. Muhammad Hasbi	L	III/	Iva	Kasi Perekaman dan Verifikasi Data	S1	IV	
8	Joni Milian Hakim, S.IP	L	III/	Iva	Kasi Statistik	S1	IV	
9	Lalu Irawadi, S.Sos	L	III/	Iva	Kasi Pengelola dan Pengamanan Sandi	S1	-	
10	Jaozi Al Hasni, SE., M.Acc	L	III/d	IVa	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	-	-
11	Setioko, S.Kom	L	III/c	IVa	Kasi	S1	-	
12	Ahmad Husni, S.Sos	L	III/d		Staf	S1	-	
13	L. Muhammad Husni, SH	L	III/d		Staf	S1	-	
14	Sri Khaerani, S.Sos	P	III/c		Staf	S1	-	
15	Lely Aryani, S.Sos	P	III/c		Staf	S1	-	
16	Bq. Rustiati	P	III/b		Staf	SMU	-	
17	Hernawan Ardianto, SE. M.Ak	L	III/b		Staf	S2	-	
18	Rahmawati Dian A. ST	P	III/b		Staf	S1	-	

19	Bq.Emi Suarni Putri, S.Sos	P	III/a		Staf	S1	-	
20	Nurmah, S.Kom	P	III/b		Staf	S1	-	
21	Agus Prianto, S.Kom	L	III/b		Staf	S1	-	
22	Muh. Hariadi, S.ST	L	III/a		Staf	S1	-	
23	L. Muhammad Natsir	L	III/a		Staf	D-III	-	
24	Bambang Haryanto	L	II/d		Staf	SMU	-	
25	Ahmad Huzairin	L	II/d		Staf	SMU	-	
26	L. Suprayadi Ningrat	L	II/c		Staf	SMU	-	
27	L. Muhammad Hilal	L	II/c		Staf	SMU	-	
28	L. Abdul manap, AMd	L	II/b		Staf	D-II	-	
29	Lalu Nurdin	L	II/a		Staf	SD	-	
30	Irvan Halomon	L	II/a		Staf	SMU	-	
31	Syarif Hidayatullah	L	II/a		Staf	SMU	-	

BAB II

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan urusan yang dilaksanakan tahun Anggaran 2018.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Demikian pula, penyusunan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal

sebagai siklus anggaran (budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.

Berikut adalah jumlah Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun anggaran 2018, yaitu jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.188.560.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.136.677.871,00 atau mencapai 97,63 %. Sementara untuk Tahun Anggaran 2017 mencapai realisasi sebesar 97,18%.

Tabel 3

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH
KEADAAN s.d Desember 2018**

NO	KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE (%)		SISA ANGGARAN
				KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI	2,294,251,074.57	2,239,656,930	97.62	100.00	54.594.144.57
II	BELANJA LANGSUNG	2,188,560,000	2,136,677,871	97.63	100.00	51,882,129
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325,911,000	310,457,931	95.26	100.00	15,453,069
1	<i>Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	30,000,000	27,814,628	92.72	100.00	2,185,372
	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	27,814,628			
	Belanja Air	3,000,000	814,628	27.15	100.00	2,185,372
	Belanja Listrik	27,000,000	27,000,000	100.00	100.00	-
2	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	28,358,000	27,368,500	96.51	100.00	989,500
	Belanja Barang dan Jasa	28,358,000	27,368,500			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1,855,000	1,855,000	100.00	100.00	-
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,705,500	1,703,500	99.88	100.00	2,000
	Belanja Dekorasi dan Publikasi	6,590,000	5,815,000	88.24	100.00	775,000
	Belanja Jasa Tukang	18,207,500	17,995,000	98.83	100.00	212,500
3	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	113,694,000	108,360,703	95.31	80.14	5,333,297
	Belanja Barang dan Jasa	105,816,500	101,360,703			
	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	67,076,500	64,733,900	96.51	100.00	2,342,600
	Belanja Jasa Service	35,200,000	35,195,803	99.99	100.00	4,197
	Belanja STNK	3,540,000	1,431,000	40.42	40.42	2,109,000

	Belanja Modal	7,877,500	7,000,000			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	7,877,500	7,000,000	88.86	100.00	877,500
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40,940,000	34,651,000	84.64	97.46	6,289,000
	Belanja Pegawai	13,420,000	13,420,000			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,420,000	13,420,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	27,520,000	21,231,000			
	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	2,100,000	2,100,000	100.00	100.00	-
	Belanja surat kabar/majalah	3,240,000	2,130,000	65.74	100.00	1,110,000
	Belanja Jasa Tukang	19,200,000	14,400,000	75.00	100.00	4,800,000
	Belanja cetak dan penggandaan	2,980,000	2,601,000	87.28	87.28	379,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,650,000	17,647,000	99.98	100.00	3,000
	Belanja Barang dan Jasa	17,650,000	17,647,000			
	Belanja ATK	15,700,000	15,697,000	99.98	100.00	3,000
	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	1,950,000	1,950,000	100.00	100.00	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	21,780,000	21,755,000	99.89	100.00	25,000
	Belanja Barang dan Jasa	21,780,000	21,755,000			
	Belanja makan dan minum	21,780,000	21,755,000	99.89	100.00	25,000
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	73,489,000	72,861,100	99.15	98.94	627,900
	Belanja Barang dan Jasa	73,489,000	72,861,100			
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,095,000	9,880,000	97.87	97.87	215,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63,394,000	62,981,100	99.35	100.00	412,900
B	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42,320,000	39,635,250	93.66	100.00	2,684,750
8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,320,000	39,635,250	93.66	74.50	2,684,750
	Belanja Pegawai	26,945,000	26,945,000	100.00	100.00	-
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	26,945,000	26,945,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	15,375,000	12,690,250	82.54	82.54	2,684,750
	Belanja cetak	1,000,000	225,000	22.50	22.50	775,000
	Belanja cetak dan pengadaan	5,735,000	3,870,250	67.48	67.48	1,864,750
	Belanja makan minum rapat	8,640,000	8,595,000	99.48	100.00	45,000
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1,037,239,000	1,007,043,640	97.09	100.00	30,195,360
9	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	929,800,000	912,665,640	98.16	95.80	17,134,360
	Belanja Pegawai	190,650,000	178,450,000	93.60	100.00	12,200,000
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (PNS)	110,050,000	108,650,000	98.73	100.00	1,400,000
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (NON PNS)	80,600,000	69,800,000	86.60	100.00	10,800,000
	Belanja Barang dan Jasa	102,750,000	101,824,700	99.10	99.10	925,300

	Belanja Kawat/Faksimili/Intranet/TV Kabel/Tv Satelit	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Jasa Tukang	32,000,000	32,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja pengadaan	750,000	337,500	45.00	45.00	412,500
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000	4,500,000	90.00	90.00	500,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000	29,987,200	99.96	100.00	12,800
	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	28,000,000	28,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	636,400,000	632,390,940	99.37	99.37	4,009,060
	Pengadaan alat rumah tangga (Handy Cam, TV Wall, Honor Panitia)	327,925,000	327,092,000	99.75	100.00	833,000
	Pengadaan Personel Komputer	11,475,000	10,900,000	94.99	100.00	575,000
	Pengadaan Peralatan Personel Komputer	115,300,000	113,750,000	98.66	100.00	1,550,000
	Pengadaan peralatan jaringan (server)	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan peralatan jaringan (Renovasi Tower Utama)	36,300,000	36,033,540	99.27	99.27	266,460
	Pengadaan CCTV	45,400,000	44,615,400	98.27	100.00	784,600
10	Pemeliharaan Alat-alat Studio	40,928,000	40,588,250	99.17	100	339,750
	Belanja Barang dan Jasa	38,428,000	38,089,250	99.12	99.12	338,750
	Belanja bahan peralatan elektronik	38,428,000	38,089,250	99.12	100.00	338,750
	Belanja Modal	2,500,000	2,499,000	99.96	99.96	1,000
	Pengadaan peralatan Alat kantor (Mesin Tik)	2,500,000	2,499,000	99.96	100.00	1,000
11	Penyusunan Pedoman Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	66,511,000	53,789,750	80.87	99.44	12,721,250
	Belanja Pegawai	31,080,000	19,430,000	62.52	62.52	11,650,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,080,000	19,430,000	62.52	100.00	11,650,000
	Belanja Barang dan Jasa	25,911,000	24,839,750	95.87	95.87	1,071,250
	Belanja ATK PPID	1,400,000	1,400,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Nara Sumber	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	2,500,000	2,499,750	99.99	100.00	250
	Belanja Sewa Gedung	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00	-
	Belanja Makan minum	9,250,000	8,250,000	89.19	100.00	1,000,000
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,961,000	4,890,000	98.57	98.57	71,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,520,000	9,520,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan Laptop	9,520,000	9,520,000	100.00	100.00	-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	209,240,000	205,691,050	98.30	98.30	3,548,950
12	Pengolahan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah	152,110,000	149,605,250	98.35	91.91	2,504,750
	Belanja Pegawai	31,650,000	30,525,000	96.45	96.45	1,125,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,650,000	30,525,000	96.45	100.00	1,125,000

	Belanja Barang dan Jasa	105,510,000	104,130,250	98.69	98.69	1,379,750
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75,250,000	75,250,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	30,260,000	28,880,250	95.44	95.44	1,379,750
	Belanja cetak	18,750,000	18,750,000	100.00	100.00	-
	Belanja penggandaan	2,060,000	680,250	33.02	33.02	1,379,750
	Belanja Makan minum	9,450,000	9,450,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	14,950,000	14,950,000	100.00	100.00	-
	Belanja modal pengadaan personal komputer (Laptop)	14,950,000	14,950,000	100.00	100.00	-
13	Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi	57,130,000	56,085,800	98.17	98.45	1,044,200
	Belanja Pegawai	8,840,000	8,840,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,840,000	8,840,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	48,290,000	47,245,800	97.84	97.84	1,044,200
	Belanja Dekorasi dan Publikasi	140,000	140,000	100.00	100.00	-
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,850,000	2,850,000	100.00	100.00	-
	Belanja cetak penggandaan	500,000	500,000	100.00	100.00	-
	Belanja sewa gedung	14,000,000	13,000,000	92.86	92.86	1,000,000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,800,000	30,755,800	99.86	100.00	44,200
E	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	573,850,000	573,850,000	100.00	100.00	-
14	Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	573,850,000	573,850,000	100.00	100.00	-
	Belanja Barang dan Jasa	566,650,000	566,650,000			
	Belanja Broad Band Internet	566,650,000	566,650,000	100.00	100.00	-
	Belanja Modal	7,200,000	7,200,000	100.00	100.00	-
	Pengadaan Laptop Teknisi Jaringan	7,200,000	7,200,000	100.00	100.00	-
	TOTAL	4,482,811,075	4,376,334,801	97.62	98.00	106,476,274

2.2 Rincian Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018

1. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan informasi Tahun 2018 diarahkan pada :

- a. Perluasan dan Pemeliharaan Jaringan
- b. Pengembangan dan Pemeliharaan Database
- c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - b. Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi.
 - c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)
4. Program Pengembangan Data Informasi
 - a. Pengolahan, Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah.
 - b. Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi.
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan
 - a. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

2. Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah pagu dana sebesar Rp.
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.00.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 27.814.628,00 atau terealisasi sebesar 97.63 %.
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah anggaran sebesar Rp. 28.358.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 27.368.500,00 atau sebesar 96.51%.
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jumlah anggaran sebesar Rp. 113.694.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 108.360.703,00 atau sebesar 95.31%.
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.940.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 34.651.000,00 atau sebesar 84.64%.
 - e. Penyediaan alat tulis kantor jumlah anggaran sebesar Rp. 17.650.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 17.647.000,00 atau sebesar 99.98%.
 - f. Penyediaan makanan dan minuman jumlah anggaran sebesar Rp.21.780.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 21.755.000,00 atau sebesar 99.89%.
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi jumlah anggaran sebesar Rp. 73.489.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 72.861.100,00 atau sebesar 99.90%.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah anggaran sebesar Rp. 42.320.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 39.635.250,00 atau sebesar 93.66%.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi jumlah anggaran sebesar Rp. 929.800.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 912.665.640,00 atau sebesar 98.16%.
 - b. Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi jumlah anggaran sebesar Rp. 40.928.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 40.588.250,00 atau sebesar 99.17%
 - c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 66.511.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 53.789.750,00 atau sebesar 80.87%.
4. Program Pengembangan Data Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pengelolaan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 152.110.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 149.605.250 atau sebesar 98.35%.
 - b. Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi jumlah anggaran sebesar Rp. 57.130.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 56.085.800,00 atau sebesar Rp. 98.17%
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan
 - a. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik jumlah anggaran sebesar Rp. 573.850.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 573.850.000,00 atau sebesar 100%.

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki/dilaksanakan SKPD Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman tentang pelaksanaan program kegiatan yang harus ditaati. Berikut SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sesuai tabel dibawah.

Tabel 4
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Jenis SOP yang dimiliki/dilaksanakan	Dasar Hukum Penetapan/Pembentukan SOP	Permasalahan yang dihadapi	Solusi
1	SOP Surat Keluar	Perda No. 6 Th. 2016 dan Perbub No. 81 Th. 2016	Arsipasi dokumen tidak tertib	Usul Penambahan SDM dan Bimtek Kearsipan
2	SOP Surat Masuk	Kepmendagri No. 30 Th. 1979 dan Perda No. 1.a Th. 2012	Arsipasi dokumen tidak tertib	Usul Penambahan SDM dan Bimtek Kearsipan
3	SOP Pengembangan Aplikasi Web	UU No. 11 Th 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 82 Th 2012, Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2 006	Masih kurangnya dukungan dari para pengambil Kebijakan, Kurangnya SDM dibidang IT/Progremer	Sosialisasi IT dan Usul Tenaga IT
4	SOP Pengembangan Network	UU No. 11 Th 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 82 Th 2012, Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2 006	Masih kurangnya dukungan dari para pengambil Kebijakan, Kurangnya SDM dibidang IT/Progremer	Sosialisasi IT dan Usul Tenaga IT
5	SOP Penyediaan Basis Data	UU No. 11 Th 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 82 Th 2012, Instruksi Presiden No. 3 Th. 2003 Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2 006	Fungsi Koordinasi antar Dinas terkait masih sangat kurang atau masih kurangnya kepedulian akan pentingnya akses data dari SKPD	Tingkatkan fungsi Koordinasi antar SKPD terkait.
6	SOP Penyediaan Network	UU No. 11 Th 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 82 Th 2012, Instruksi Presiden No. 3 Th. 2003 Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2 006	Kurangnya tanggungjawab SKPD terhadap Network yang sudah terpasang.	Penunjukan satu orang pengelola network di masing-masing SKPD
7	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	UU No. 11 Th 2008, UU No. 14 Th. 2008, PP No. 82 Th 2012, Instruksi Presiden No. 3 Th. 2003 Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2 006	Kurangnya tanggungjawab SKPD terhadap Network yang sudah terpasang.	Penunjukan satu orang pengelola network di masing-masing SKPD
8	SOP Pedoman Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	UU 14 Tahun 2008, UU 25 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2013, PP 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010, Peraturan	Dukungan dan kepedulian tentang keberadaan dan pentingnya PPID relatif	Mengaktifkan peran PPID Utama dan PPID Pembantu dengan pembentukan SK Tim

		Komisi Informasi 1 Tahun 2013	kurang dari stakeholder dan SKpd	dan Sosialisasi PPID secara continue.
--	--	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Berisi uraian tentang kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan masing-masing program dan kegiatan

2.5 Permasalahan dan Solusi.

Hambatan atau masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder (pemangku), dan masyarakat dalam bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas kinerja.
2. Belum memadainya tingkat pemenuhan kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang professional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah .
3. Penempatan SDM PNS bidang Teknik Informatika khususnya profesional Programmer dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masing sangat kurang.
4. Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dijadikan prioritas pembangunan daerah.
5. Anggaran serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih kurang dan sangat terbatas.
6. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan SKPD kabupaten Lombok Tengah sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.

Hambatan atau masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang cermat agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya di antaranya :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tercantum dalam Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dan tetap memasukkan nomenklatur kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada dokumen-dokumen penganggaran, baik dokumen RKPD, Renja maupun Renstra.
2. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah;

3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menempatkan pembangunan Teknologi Informasi sebagai prioritas utama pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, di samping pembangunan-pembangunan prioritas lainnya, seperti pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.
5. Rekrutmen PNS bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masing kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer, Jaringan, dan Multimedia.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi serta kearsipansecara berkesinambungan sesuai perkembangannya.
7. Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi, edukasi (bimtek) dan pemahaman kepada para pimpinan SKPD dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan SKPD Kabupaten Lombok Tengah sebagai instrument dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).
9. Penataan dan evaluasi struktur kelembagaan organisasi ke arah yang lebih efisien dan memiliki tugas pokok fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih institusi satu dengan yang lainnya.

Tabel 5

**CAPAIAN KINERJA SASARAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2018	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1.	Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	39	29 SKPD dan 12 Kecamatan	74%
			2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana IT			
			3.	Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.	36 orang	3 orang	
Rata-rata Capaian sasaran							
1	2	3	4	5	6	7	

2.	Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	Data dan dokumen yang di Publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah	Jumlah Data dan dokumen yang di Publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah	100%		
Rata-rata Capaian sasaran						
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah	Jumlah pengunjung website				
4	Tersedianya Buku Lombok Tengah Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Data Sektoral	Pengembangan Data/Informasi Daerah	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah	145 Buku	145 Buku	100
5	Terlaksananya sosialisasi pengamanan informasi daerah	Pengembangan Data/Informasi Daerah	Meningkatnya efektifitas pengamanan informasi dan komunikasi daerah	100	100	100
Rata-rata Capaian sasaran						
RATA-RATA CAPAIAN URUSAN						

SASARAN	PROGRAM		INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD	REALISASI			
					RPJMD % SKPD %			
Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1	Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	100%			29 SKPD	100
		2	Terpenuhinya sarana dan prasarana IT	100%			1 PAKET	100

		3	Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.		100%			3 ORANG	100
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN									100
Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base		1	Data dan dokumen yang di Publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah		100%			100%	95
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN									95
Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah		1	Jumlah pengunjung website		500.000 pengunjung			581.000 pengunjung	94
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN									94%
RATA CAPAIAN URUSAN								95%	95%

Analisa Pencapaian kinerja

Target pada urusan komunikasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran :

- 1) Penjelasan pencapaian sasaran no.1 yaitu “Meningkatnya perluasan dan pemeliharaan jaringan dapat mencapai 100%.

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet,terpenuhinya sarana dan prasarana IT dan Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. Hal ini dapat dilihat dari telah dipasangnya peralatan infrastruktur jaringan pada semua SKPD dan Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah dan telah dapat dilakukan komunikasi data.

- 2) Penjelasan pencapaian sasaran no. 2 “Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base dapat mencapai 100%

Pencapaian target tersebut didukung oleh Indikator “Data dan dokumen yang di Publish melalui website Pemda Kab.Lombok Tengah. Adapun dokumen yang dapat terdiri dari, RPJMD,Lombok Tengah Dalam Angka, PDRB,LAKIP,Hasil Evaluasi RPJMD,LKPJ.

- 3) Penjelasan pencapaian sasaran no. 3 Meningkatnya jumlah pengunjung situs resmi Pemkab.Lombok Tengah dapat mencapai 100% .

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Jumlah pengunjung website mencapai 100%. Tingginya jumlah pengunjung situs menjadi tolok ukur website dibutuhkan oleh masyarakat pengguna data dan informasi, faktor yang menjadi besarnya pengunjung sebuah website adalah konten yang ada dalam website tersebut serta memiliki data yang valid dan uptodate.

PENUTUP

3.1 URAIAN KEBERHASILAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah TA.2018 di susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 5 sasaran strategis. Berdasarkan kelima sasaran strategis, maka realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2018 secara umum dikatakan tercapai sesuai target yang ditetapkan hal tersebut dapat dilihat dari prosentase capaian program kegiatan baik fisik maupun keuangan diatas 97.62% .

Pada sisi lain, memang ada beberapa kegiatan yang volume kegiatannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran maupun perubahan akun kegiatan pada pembahasan APBD Perubahan. Sementara untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Ke depan, diharapkan dengan dukungan dana / anggaran yang memadai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah akan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara tepat dan berdaya guna.

3.2 HAMBATAN/MASALAH

Keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2018 yang telah dibuktikan dengan tingkat capaian kinerja diatas 97%, bukan berarti tanpa ada hambatan atau permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2018. Berikut adalah hambatan atau permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2018 yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder (pemangku kepentingan), dan masyarakat dalam bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas kinerja.
2. Masih rendahnya dukungan dana untuk membiayai program kegiatan unggulan yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemerintah Daerah.

3. Belum memadainya tingkat pemenuhan kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Penempatan SDM PNS bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masih kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer, Pranata Komputer, Multimedia, Teknik Informatika dan Sistem Informasi .
5. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dijadikan prioritas pembangunan daerah.
6. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
7. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan SKPD kabupaten Lombok Tengah sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.

3.3 UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan atau masalah yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang cermat agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya di antaranya :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tercantum dalam Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 dan tetap memasukkan nomenklatur kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada dokumen-dokumen penganggaran, baik dokumen RKPD, Renja maupun Renstra.
2. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menempatkan pembangunan Teknologi Informasi sebagai prioritas utama pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, di samping pembangunan-pembangunan prioritas lainnya, seperti pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.
5. Rekrutmen PNS bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masing kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer, Multimedia, dan Jaringan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi serta kearsipan secara berkesinambungan sesuai perkembangannya.
7. Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi, edukasi (bimtek) dan pemahaman kepada para pimpinan SKPD dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan SKPD Kabupaten Lombok Tengah sebagai instrument dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

8. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata Pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Laporan ini kami sampaikan, kritik, saran dan pemikiran-pemikiran yang bersifat penyempurnaan sangat kami harapkan, dan mudah-mudahan laporan ini ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. Muhamad ZARKASI
NIP. 196607061993031015